

PENYUSUNAN KAJIAN INDEKS WILLIAMSON KOTA SURAKARTA

Bayu Harjono

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta

Agung Riyadi

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta

***Abstract.** Regional economic development with the population aspect has a close relationship. The relationship between population and economic development contains several important meanings. First, the population, or in this case the population, is the center of all development policies and programs implemented. New development is said to be successful if it is able to improve the welfare of the population in a broad sense. Second, the circumstances and conditions of the existing population greatly affect the dynamics of development carried out by the government. A large population, if followed by an adequate quality of population, will be a driving force for economic growth. Conversely, a large population, if followed by a low level of quality, makes the population a burden for development. Third, the impact of the new population dynamics will be felt in the long term. Because the impact is only felt in the long term, people's problems in development are often overlooked.*

***Keywords:** development, economy, population.*

Abstrak. Pembangunan ekonomi daerah dengan aspek kependudukan memiliki keterkaitan yang erat. Keterkaitan penduduk dan pembangunan ekonomi mengandung beberapa makna yang penting. Pertama, kependudukan, atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan. Pembangunan baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas. Kedua, keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan. Ketiga, dampak dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang, sering kali permasalahan penduduk dalam pembangunan terabaikan.

Kata kunci: pembangunan, ekonomi, kependudukan.

LATAR BELAKANG

Aspek kependudukan dalam pembangunan daerah membawa beberapa permasalahan. Pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa konsekuensi munculnya permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Pemerintah daerah memiliki tugas dan kewajiban untuk menjamin setiap penduduk mendapatkan kesejahteraan. Tingginya pertumbuhan penduduk di daerah membuat tugas tersebut perlu mendapatkan perhatian ekstra. Kedua, pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa dampak pada meningkatnya angka penduduk usia kerja (penduduk yang berusia 15 tahun ke atas) dan hal ini memperbesar jumlah angkatan kerja. Peningkatan angkatan kerja mengharuskan pemerintah daerah untuk mampu mendorong dan memberikan stimulus yang mengarah pada peningkatan pemberdayaan masyarakat, bahkan pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan lapangan kerja. Ketiga, pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menciptakan kemiskinan dan ketimpangan, apabila tidak diikuti dengan kualitas sumber daya manusia serta pertumbuhan ekonomi daerah yang mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah sebagai berikut: (1) peningkatan standar hidup setiap orang, (2) penciptaan berbagai kondisi yang memnungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri, dan (3) peningkatan kebebasan setiap orang. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah daerah menyusun kebijakan yang diharapkan mampu menghilangkan atau mengurangi permasalahan yang sering muncul dalam pembangunan, sehingga langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah diharapkan mampu: (1) mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah, (2) memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, (3) menciptakan atau menambah lapangan kerja, (4) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dan (5) menjaga kelestarian sumberdaya alam.

GAMBARAN UMUM MAKROEKONOMI KOTA SURAKARTA

Visi Dan Misi Kota Surakarta

Visi Kota Surakarta Tahun 2021–2026 adalah: “MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”. Penjabaran Visi Kota Budaya akan diterjemahkan dalam Misi. Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara

mewujudkan Visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus ada dan bagaimana komitmen terus dijaga oleh segenap stakeholders selaku pemangku kepentingan dalam pembangunan.

Visi Kota Surakarta tersebut sebagai pemandu gerak bersama antara pemerintahan dan segenap warganya untuk membangun karakter Kota Surakarta, beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial-budaya. Kota Surakarta terus tumbuh dan berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa meninggalkan jati diri dan karakternya sebagai kota dengan warisan budaya yang kental, sebagai the Spirit of Java. Upaya mewujudkan kota modern dan masyarakat yang sejahtera bermodalkan warisan budaya gotong royong dilandasi dengan karakter kota: Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera.

Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi. Rumusan misi dan penjelasan elemen misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagai berikut: 1. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan; 2. memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan; 3. mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan; 4. meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga; 5. mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan; 6. mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif; dan 7. mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

Misi 1 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan

Misi 1 mengarahkan “Surakarta Sehat”, merupakan langkah terdepan untuk bangkit dari kondisi pandemi COVID-19 dan menjadi pembelajaran kearifan untuk menghadapi kemungkinan bentuk tantangan kesehatan lainnya. Pemerintah Kota Surakarta memastikan agar kasus COVID-19 segera teratasi dan memberi rasa aman kepada seluruh masyarakat Surakarta. Selain itu juga membangun masyarakat yang peduli menjaga kesehatan dari COVID-19 atau tantangan penyakit lainnya dan beradaptasi dengan kehidupan baru. Pada konteks yang lebih luas, misi kesehatan ini mengarah pada upaya mewujudkan resiliensi masyarakat, yaitu membangun kapabilitas

masyarakat yang adaptif dan tangguh menghadapi era disruptif dengan tantangan perubahan yang tak terduga. Selain itu juga membentuk masyarakat berbudaya sehat, melalui pendekatan promotif dan preventif untuk menurunkan angka kesakitan sehingga berdampak pada efisiensi anggaran kesehatan masyarakat.

Budaya sehat juga bermakna kemampuan masyarakat memanfaatkan sumberdaya bahan-bahan kesehatan tradisional dan kearifan lokal di bidang kesehatan bersinergi dengan setor pemajuan kebudayaan dan pariwisata menjadi produk wellness tourism. Resiliensi di bidang kesehatan memerlukan gotong royong berbagai pihak supaya universal health coverage (cakupan pemilikan jaminan kesehatan) terpenuhi, sehingga masyarakat mampu mengakses layanan kesehatan kuratif.

Misi 2 Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan

Misi 2 mengarahkan “Surakarta Kreatif-Makmur”, bertujuan menjawab tantangan di bidang ekonomi, khususnya mendorong gairah warga kota bangkit bersama paska pandemi COVID-19 dalam tatanan normal baru. Pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 diharapkan menjadi pembelajaran bagi kepemimpinan pemerintah kota supaya lebih inovatif dan kolaboratif untuk: (i) memfasilitasi pelaku UMKM terdampak COVID-19; (ii) menggerakkan perdagangan ekspor; (iii) menggaet investor untuk berinvestasi; dan (iv) orang berkunjung dan membelanjakan uangnya di Kota Surakarta sehingga pertumbuhan sektor riil meningkat. Pada gilirannya meningkat pula kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang adaptif memperhatikan komponen lapangan usaha yang kritis sebagai penopang ekonomi dan kesejahteraan penduduknya.

Misi 3 Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan

Misi 3 mengarahkan “Surakarta Maju”, memandu Pemerintah Kota Surakarta mengatasi tantangan kota modern seperti mengangkat citra Kota Budaya. Permasalahan kecukupan infrastruktur berstandar kualitas baik, inklusif, ramah lingkungan, dan menguatkan ingatan masyarakat pada sejarah peradaban daerah harus dikelola dalam kerangka memajukan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya Modern. Misi 3 ini mengarahkan pengembangan tata ruang beridentitas budaya untuk memantapkan peran Kota Surakarta sebagai Kota Budaya sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Nasional, mempertimbangkan keterpaduan dengan daerah sekitar untuk menguatkan peran Kota

Surakarta sebagai pusat perdagangan dan budaya. Kawasan pusat pelayanan diarahkan menyebar, sehingga perkembangan kota bisa merata sampai ke pinggiran, sehingga mengurangi risiko kemacetan dan beban jalan.

Misi 3 memandu pengembangan wilayah dan penataan ruang harus dikelola dengan visi Solo Past as Solo Future, sehingga Kota Surakarta tetap berkembang modern namun keunikannya sebagai kota budaya tidak hilang. RTRW Kota Surakarta merumuskan bahwa tantangan pembangunan transportasi publik Kota Surakarta dari aspek tata ruang adalah sulitnya menggeser pusat-pusat aktivitas warga dari kawasan tengah kota.

Misi 4 Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga

Misi 4 mengarahkan “Surakarta Kreatif-Unggul”. Pembangunan diarahkan pada upaya menumbuhkan masyarakat cerdas berkarakter unggul. Kelompok pemuda (usia 16–30 tahun) dijadikan sebagai target khusus, untuk ditingkatkan kemampuan kepemimpinannya di bidang ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Cerdas, terdidik, dan berkarakter unggul adalah modal dasar keberdayaan produktivitas dan keunggulan masyarakat. Kemajuan teknologi informasi memperbesar terpaan paham dunia melalui jaringan media sosial yang tak jarang berpotensi merusak karakter dasar masyarakat yang adiluhung.

Misi 5 Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan.

Misi 5 mengarahkan “Surakarta Gesit”, merepresentasikan konsep agile government dan adaptive government. Pemerintah yang gesit memiliki kapasitas untuk memahami dan memenuhi kebutuhan publik dalam jangka pendek, beradaptasi dengan tren dan masalah dalam jangka menengah, dan membentuk kebutuhan publik dalam jangka panjang. Pemerintahan yang agile, yaitu lincah, gesit, cerdas, tangkas, digambarkan dengan penerapan manajemen yang inovatif, responsif, dan sensitif melalui penciptaan struktur organisasi yang adaptif, pemanfaatan teknologi informasi yang cerdas dan antisipasi terhadap lingkungan disruptif di berbagai sektor. Misi 5 memandu penyederhanaan birokrasi dan pelayanan publik agar kebijakan dapat diputuskan dengan cepat, tepat, dan responsif. Birokrasi tidak perlu alergi dengan masukan, keluhan, dan aduan masyarakat. Perlu juga ditingkatkan penerapan birokrasi digital, standarisasi

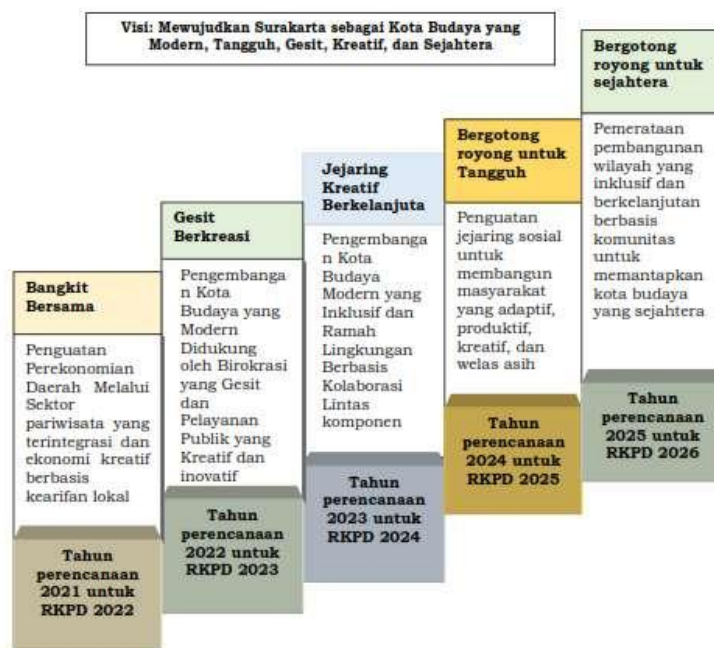
pelayanan, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) untuk kecepatan dan ketepatan pelayanan. Standarisasi pelayanan dan profesionalisme ASN untuk memastikan birokrasi tetap berjalan efektif, cepat, dan responsif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah yang adaptif adalah pemerintah yang mampu membangun kolaborasi (collaborative governance).

Misi 6 Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif

Tema Pembangunan Kota Surakarta

Menurut Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, tema pembangunan untuk Kawasan Subosukawonosraten berdasarkan analisis serta potensi dan tantangan adalah: "Pembangunan Wilayah Subosukawonosraten Berbasis Pariwisata Terpadu yang Didukung oleh Pertanian dan Industri Pengolahan dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan". Adapun maksud dari tema pembangunan adalah pembangunan wilayah yang bertumpu pada sektor utama pariwisata terpadu (alam, budaya, dan buatan) yang didukung oleh sektor pertanian dan industri pengolahan. Pembangunan wilayah dilakukan berlandaskan prinsip berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tema pembangunan Kota Surakarta disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Sumber: RPJMD Kota Surakarta 2022-2027

KONSEP DAN METODOLOGI

Aspek Kependudukan Dalam Pembangunan Daerah

Dalam konteks pembangunan di daerah, secara internal penduduk dapat dipandang dari dua sisi, yaitu kekuatan (potensi) atau kelemahan. Penduduk akan menjadi suatu kekuatan atau potensi pembangunan di daerah apabila penduduk di daerah tersebut mampu berperan secara aktif sebagai subyek pembangunan daerah. Untuk dapat berperan sebagai subyek pembangunan, penduduk haruslah memiliki kriteria minimal sebagai berikut: pertama, penduduk memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Hal ini dapat ditunjukkan antara lain melalui tingkat pendidikan yang ditamatkan sebagai besar penduduk. Hasil studi empiris yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk berpengaruh secara signifikan dalam kemajuan atau pembangunan daerah. Kedua, penduduk memiliki rasio ketergantungan yang kecil, artinya struktur penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif diharapkan mampu memberikan kontribusi dan partisipasi yang lebih besar dalam pembangunan daerah. Struktur penduduk yang didominasi oleh usia tidak produktif (anak-anak dan orang tua atau manula) dapat menghambat progresivitas pembangunan daerah. Ketiga, laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mendorong semakin besarnya beban rumah tangga melalui tingginya tingkat konsumsi terutama makanan. Hal ini akan menjadikan lambatnya tujuan pembangunan daerah sesuai dengan yang diharapkan.

Penduduk merupakan pusat dari kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan penduduk merupakan permasalahan pembangunan dalam jangka panjang dan permasalahan tersebut membawa implikasi yang luas dalam pembangunan daerah. Atas dasar hal tersebut, penting bagi daerah untuk merumuskan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Pembangunan berwawasan kependudukan berorientasi pada pendekatan 'bottom-up planning'. Melalui pendekatan ini, tujuan utama seluruh proses pembangunan adalah lebih memeratakan kesejahteraan penduduk daripada mementingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena itu pendekatan 'bottom-up' berupaya mengoptimalkan penyebaran sumberdaya yang dimiliki dan potensial ke seluruh wilayah dan membangun sesuai dengan potensi dan masalah khusus yang dihadapi oleh daerah masing-masing. Pendekatan bottom-up mengisyaratkan kebebasan daerah atau wilayah untuk merencanakan pembangunan sendiri sesuai dengan keperluan

dan keadaan daerah masing-masing. Oleh karena itu otonomi yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masing-masing daerah agar mampu mengatur dan menjalankan berbagai kebijaksanaan yang dirumuskan sendiri guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah atau kawasan yang bersangkutan. Melalui otonomi daerah, yang berarti adalah desentralisasi pembangunan, maka laju pertumbuhan antar daerah akan semakin seimbang dan serasi, sehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasil-hasilnya semakin merata di seluruh Indonesia.

Terdapat beberapa ciri kependudukan dimasa mendatang yang harus dicermati dalam konteks pembangunan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ciri-ciri kependudukan tersebut antara lain:

1. Penduduk dimasa depan akan semakin tinggi pendidikannya.

Penduduk yang makin berpendidikan dan sehat akan membentuk sumber daya manusia yang makin produktif. Tantangannya adalah menciptakan lapangan kerja yang memadai. Sebab bila tidak, jumlah penganggur yang makin berpendidikan akan bertambah. Keadaan ini dengan sendirinya merupakan pemborosan terhadap investasi nasional. Karena sebagian besar dana tercurah dalam sektor pendidikan, disamping kemungkinan terjadinya implikasi sosial lainnya yang mungkin timbul.

2. Penduduk yang makin sehat dan angka harapan hidup naik.

Usia harapan hidup yang tinggi dan jumlah penduduk lanjut semakin besar akan juga menuntut kebijaksanaan-kebijaksanaan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Suatu tantangan pula untuk dapat memanfaatkan penduduk usia lanjut yang masih potensial agar dapat dimanfaatkan sesuai pengetahuan dan pengalamannya.

3. Penduduk akan bergeser ke usia yang lebih tua.

Pada saat ini telah terjadi proses transisi umur penduduk Indonesia dari penduduk muda ke penduduk tua (ageing process). Pergeseran struktur umur muda ke umur tua produktif akan membawa konsekuensi peningkatan pelayanan pendidikan terutama pendidikan tinggi dan kesempatan kerja. Sedang pergeseran struktur umur produktif ke umur tua pada akhirnya akan mempunyai dampak terhadap persoalan penyantunan penduduk usia lanjut. Bersamaan dengan perubahan sosial ekonomi diperkirakan akan terjadi pergeseran pola penyantunan usia lanjut dari keluarga kepada institusi. Apabila hal ini terjadi, maka tanggung jawab pemerintah akan semakin berat.

4. Penduduk yang tinggal di perkotaan semakin banyak.

Seiring dengan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat, presentase penduduk yang tinggal diperkotaan meningkat dari tahun ke tahun. Masalah urbanisasi akan menjadi masalah yang semakin menonjol. Penduduk perkotaan akan bertambah terus sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, tuntutan fasilitas perkotaan akan bertambah pula. Tambahan volume fasilitas perkotaan akan sangat berpengaruh terhadap keadaan dan perkembangan fisik kota yang bersangkutan. Meningkatnya sarana perhubungan dan komunikasi antar daerah, termasuk di daerah perdesaan, menyebabkan orang dari perdesaan tidak perlu lagi melakukan migrasi dan berdiam di daerah perkotaan. Mereka cukup menuju daerah perkotaan manakala diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dalam kurun waktu harian, mingguan, bahkan bulanan. Dengan semakin berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi, pola mobilitas penduduk seperti itu akan semakin banyak dilakukan, sementara migrasi permanen cenderung akan makin menurun.

5. Jumlah rumahtangga akan meningkat namun ukurannya makin kecil.

Perubahan pola kelahiran dan kematian akan berpengaruh pada struktur rumahtangga. Dimasa depan ukuran rumahtangga akan semakin mengecil, namun jumlahnya akan semakin banyak. Dengan makin sedikitnya jumlah anak yang dimiliki dan disertai dengan peningkatan kesehatan penduduk, seiring tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih baik, memberikan kesempatan pula bagi individu maupun keluarga untuk melakukan mobilitas kedaerah lain.

6. Intensitas mobilitas penduduk yang makin tinggi.

Mobilitas penduduk yang makin tinggi baik secara internal maupun internasional menuntut jaringan prasarana yang makin baik dan luas. Selain itu akan membawa kepada pergeseran norma-norma masyarakat, seperti ikatan keluarga dan kekerabatan. Kesemuanya ini dapat membawa dampak yang berjangka panjang terhadap perubahan sosial budaya masyarakat.

7. Masih tingginya pertumbuhan angkatan kerja.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka laju pertumbuhan angkatan kerjanya pun cukup tinggi. Permasalahan yang ditimbulkan oleh besarnya jumlah dan pertumbuhan angkatan kerja tersebut disatu pihak menuntut kesempatan kerja yang lebih besar. Dipihak lain menuntut pembinaan angkatan kerja itu sendiri agar

mampu menghasilkan keluaran yang lebih tinggi sebagai prasyarat untuk memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas.

Pengangguran, Kemiskinan, Pembangunan Ekonomi Lokal

Masalah kependudukan yang seringkali dihadapi adalah masalah yang berkaitan erat dengan pengangguran. Pengangguran sendiri muncul akibat dari kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan penawaran tenaga kerja. Tingginya penawaran kerja diakibatkan oleh meningkatnya angkatan kerja, sedangkan peningkatan angkatan kerja merupakan dampak dari meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. Dalam angkatan kerja, jumlah penduduk yang tidak bekerja mencerminkan tingkat pengangguran yang terjadi. Pengangguran yang terjadi di suatu daerah berdampak pada tingkat kemiskinan karena kebutuhan hidup tidak dapat dipenuhi akibat tidak tersediannya lapangan kerja. Oleh karena itu semakin meningkatnya proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas perlu diperhatikan, mengingat hal ini dapat mendorong terjadinya pengangguran apabila penduduk 15 tahun ke atas tersebut tidak bersekolah dan tidak bekerja. Pengangguran yang terjadi memiliki dampak langsung terhadap kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas aspek kehidupan. Ahli ekonomi Amartya K. Sen menyatakan, kemiskinan lebih terkait pada ketidakmampuan mencapai standar hidup.

Salah satu strategi mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang banyak ditempuh oleh suatu negara berkembang adalah pengembangan ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi kerakyatan bukanlah berarti menutup pengembangan sektor industri, perdagangan, maupun sektor jasa yang berskala besar, namun pengertian pengembangan ekonomi kerakyatan adalah upaya pemberdayaan masyarakat secara luas dan nyata dalam aktivitas ekonomi berdasarkan pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal yang didukung dengan sumberdaya manusia yang terampil. Pengembangan potensi ekonomi lokal tersebut diarahkan pada pengembangan skala usaha yang lebih besar, sehingga tercipta keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang (forward dan backward linkage).

Pembangunan ekonomi lokal menurut Bank Dunia (2001) adalah “..the process by which actors within cities and towns – our community – works collectively with public, business and non governmental sektor partners to create better conditions for economic growth and employment generation.”. Definisi ini mengandung pengertian

bahwa pembangunan ekonomi lokal: (1) melibatkan interaksi komponen masyarakat, (2) bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Lebih lanjut Bank Dunia mengatakan bahwa untuk mengembangkan ekonomi lokal, daerah perlu fokus pada: (1) penciptaan lingkungan usaha yang kondusif, (2) pengembangan sumberdaya manusia, (3) kemitraan masyarakat dan pemerintah, (4) mendorong investasi swasta ke barang publik, dan (5) membangun daya saing lokasi.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb)

Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Surakarta ADHB pada tahun 2010 mencapai Rp21,49 trilyun dan pada tahun 2019 naik lebih dari dua kali lipat menjadi Rp48 trilyun, namun pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebagai akibat pandemic Covid-19 sehingga PDRB ADHB Kota Surakarta turun menjadi Rp47,6 trilyun atau turun sebesar -0,75% dibanding tahun 2019. Tahun 2021

PDRB Kota Surakarta kembali meningkat menjadi Rp50,4 trilyun. Pertumbuhan sektor terbesar PDRB ADHK pada tahun 2021 adalah sektor penyediaan akomodasi makan dan minum yang mencapai 8,43% serta sektor informasi dan komunikasi yang mencapai 7,68%. Di tahun 2021 terdapat dua sektor yang mengalami pertumbuhan minus yaitu sektor pertambangan dan penggalian (-14,77%) serta sektor pengadaan air (-4,30%). Bila dihitung perubahan pertumbuhan pada periode 2020-2021 sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan kenaikan yang sangat tinggi, dari yang sebelumnya -62,54 di tahun 2020 menjadi 3,46% di tahun 2021.

Analisis Ketenagakerjaan

Pengertian “bekerja” menurut BPS adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Menurut BPS, penganggur terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.

3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Analisis Kemiskinan Dan Ketimpangan

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak yang menggunakan batas garis kemiskinan (poverty line). Dalam kemiskinan, terdapat tiga ukuran yang dipergunakan, yaitu tingkat kemiskinan, Indeks kedalaman kemiskinan, dan Indeks keparahan kemiskinan. Tingkat kemiskinan Surakarta selama 2011-2019 terlihat menunjukkan tren penurunan dari 12,92% di tahun 2011 menjadi 9,08% di tahun 2018 dan di tahun 2019 tingkat kemiskinan kembali turun 8,70%, namun tingkat kemiskinan kembali menunjukkan kenaikan selama 2019-2021. Di tahun 2020 tingkat kemiskinan menjadi 9,03% dan 2021 naik lagi menjadi 9,40%. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan selama 2019-2021 sementara kenaikan jumlah penduduk secara keseluruhan tidak sebesar kenaikan jumlah penduduk miskin. Kenaikan jumlah penduduk miskin disebabkan karena penurunan bahkan hilangnya penghasilan akibat situasi pandemic Covid 19 sementara garis kemiskinan sebagai batas antara kelompok miskin dan tidak miskin di tahun 2020 dan 2021 menunjukkan kenaikan.

Dalam hal tingkat kedalaman kemiskinan, pada tahun 2021 Kota Surakarta memiliki nilai Indeks kedalaman kemiskinan atau P1 sebesar 1,83 sedangkan nilai Indeks keparahan kemiskinan atau P2 sebesar 0,54, naik dibandingkan dengan tahun 2020. Indeks P1 menunjukkan besarnya pengeluaran penduduk terhadap garis kemiskinan, sehingga kenaikan angka P1 tersebut menggambarkan banyaknya kelompok miskin baru yang sebelumnya di atas garis kemiskinan, dan rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada lebih jauh dari bawah garis kemiskinan. Hal yang sama juga terjadi pada Indeks P2 yang di tahun 2021 yang naik dibandingkan tahun 2020 sebagai akibat adanya kelompok miskin yang baru.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Proxy PDRB atau ketimpangan distribusi pendapatan antarkecamatan di Kota Surakarta berdasarkan PDRB harga berlaku menunjukkan rata-rata nilai Indeks Williamson terkecil adalah Kecamatan Laweyan yang artinya tingkat ketimpangan penduduk kecamatan terendah dan Indeks Williamson terbesar adalah Kecamatan Jebres yang artinya tingkat ketimpangan penduduk kecamatan tertinggi.
2. Perhitungan tingkat ketimpangan di Kota Surakarta dapat menggunakan pendekatan bank dunia, pendekatan metode Sitthiyot dan Holasut, serta pendekatan Williamson. Ketiga pendekatan tersebut memberikan hasil yang tidak berbeda secara signifikan.
3. Perhitungan tingkat ketimpangan menggunakan Indeks Williamson memerlukan akurasi PDRB per kapita per kecamatan, dan data tentang hal tersebut belum tersedia sehingga dilakukan proxy.
4. Angka ketimpangan distribusi pendapatan Kota Surakarta menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini terlihat dari nilai Indeks gini maupun pengukuran menggunakan Indeks Williamson. Sedangkan dari hasil proyeksi angka Indeks Williamson, menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Kota Surakarta Tahun 2022 akan meningkat, namun pada periode 2023-2026 akan mengalami penurunan secara slowdown.

Rekomendasi

Ketimpangan merupakan side effect dari kemiskinan dan pengangguran, sehingga kebijakan dan strategi perlu difokuskan pada upaya penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran.

1. Perlu disusun database kemiskinan yang komprehensif dan standar di setiap kecamatan bekerjasama dengan BPS dan kantor Kecamatan.
Program ini dilakukan dengan melibatkan Kecamatan yang berperan dalam proses pengelolaan data kemiskinan. OPD terkait menyusun sistem informasi kemiskinan yang diintegrasikan dengan data kependudukan dengan Kecamatan sebagai pelaksana utama sehingga memudahkan penyusunan strategi serta diperolehnya gambaran riil faktor-faktor penyebab kemiskinan yang (mungkin) berbeda di setiap kecamatan.

2. OPD terkait perlu menyusun PDRB kecamatan untuk memudahkan mapping perekonomian di level kecamatan, serta memudahkan penghitungan berbagai indikator di tingkat kecamatan yang dibutuhkan.

PDRB Kecamatan merupakan informasi yang sangat penting kaitannya dengan kebijakan dan strategi yang berbasis spasial dan sektoral. Penyusunan PDRB Kecamatan melibatkan BPS.

3. Perlu upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas alokasi dana APBD serta kerjasama dengan OJK/perbankan untuk pengembangan ekonomi masyarakat lokal atau ekonomi kreatif. Anggaran yang dialokasikan dalam APBD untuk pengembangan ekonomi masyarakat dilaksanakan secara terpadu untuk menghindari adanya kemiripan atau kesamaan program dan sasaran. Dengan demikian implementasi program yang berorientasi pada pengembangan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih sistematis dan fokus dengan sasaran yang lebih terarah. OJK atau perbankan bekerja sama dengan pemerintah daerah menyusun skema kredit dalam rangka pemulihan ekonomi.

4. Memberdayakan dan memperkuat Balai Latihan Kerja dengan OPD dan pihak terkait atau perusahaan melalui skema CSR.

BLK diprioritaskan sebagai pusat pelatihan ekonomi masyarakat, yang datanya bersumber dari Kecamatan atau OPD terkait. Materi pelatihan merupakan materi yang sederhana dan aplikatif serta disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dalam pelaksanaannya penting untuk melibatkan pelaku usaha besar melalui skema CSR sehingga pelaku usaha besar perlu dilibatkan dalam kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat.

5. Memperkuat forward and backward linkages antara UMKM dengan perusahaan besar untuk memperluas multiplier effect.

Perusahaan besar menyusun berbagai kebutuhan sumber daya yang dapat dipenuhi oleh UMKM Kota Surakarta melalui skema “UMKM Binaan” atau skema “Bapak Angkat” sehingga akan memberikan multiplier effect yang besar dalam mempercepat pemulihan ekonomi.

6. Dalam jangka pendek memprioritaskan pengembangan sector ekonomi yang berdampak langsung pada pengembangan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja (sector ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja).

Sektor perdagangan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Dari sisi jenis kelaminnya, tingkat pengangguran laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dan dari sisi pendidikannya, sebagian besar adalah penduduk yang berpendidikan SD. Dengan demikian pengembangan ekonomi diarahkan pada perdagangan yang tidak memerlukan pendidikan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R (2002) *Economic Growth, Inequality and Poverty: Findings from a New Data Set*, Policy Research Working Paper 2972, World Bank, February 2002.
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. 2021. <https://surakartakota.bps.go.id>. Diakses 4 Agustus 2022.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2021. <https://jateng.bps.go.id>. Diakses 4 Agustus 2022.
- HBhanumurthy and HMitra (2004), *Economic Growth, Poverty, and Inequality in Indian States in the Pre-reform and Reform Periods*, *Asian Development Review*, vol. 21, no. 2
- Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. 2021. <https://kemnaker.go.id>. Diakses 4 Agustus 2021.
- Lin (2003), *Economic Growth, Income Inequality, and Poverty Reduction in People's Republic of China*, *Asian Development Review*, vol. 20, no. 2.
- Stern, D. I. (2004). *The rise and fall of the environmental Kuznets curve*. *World development*, 32(8), 1419-1439.
- Sitthiyot, Thitithee dan Kanyarat Holasut (2020) "A Simple Method for measuring inequality". Palgrave Communications.
- Ravallion, M dan S Chen (1997) „What Can New Survey Data Tell Us about Recent Changes in Distribution and Poverty?“ *World Bank Economic Review*. Vol. 11(2).